
ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DALAM MENGUKUR TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN PADA PROGRAM KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SORONG***ANALYSIS OF BUDGET REALIZATION REPORT IN MEASURING THE LEVEL OF BUDGET EFFICIENCY IN THE WORK PROGRAM OF THE SORONG DISTRICT HEALTH OFFICE*****Esra Maisa R. Saragi¹, Pitter Leiwakabessy², Erna Kurniawati³**^{1,2,3}Politeknik Saint Paul Sorong¹leiwakabessypitter@gmail.com, ²ernakurniawatih@gmail.com**Abstrak**

Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran bertujuan untuk menganalogikan hasil yang didapat pada Satuan Perangkat Daerah dari satu periode kepada periode-periode setelahnya, agar bisa ditafsirkan seperti apa tingkat tendensinya. melalui LRA ini diperuntukan sebaga tolak ukur dalam menilai keuangan penyelenggaraan otonomi daerah juga mampu mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pendapatan dan pengeluaran yang dihadapi selama periode tertentu. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis anggaran program kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong pada tahun anggaran 2021-2023. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021-2023. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Serta data sekunder yaitu data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021-2023. Variabel dalam penelitian ini adalah anggaran program kerja yang diukur menggunakan rasio efisiensi. Teknik analisis data yang dipakai yaitu analisis deskriptif.

Setelah adanya aktivitas perhitungan menggunakan rasio efisiensi, hasil yang didapat menunjukkan bahwa pada tahun 2021 efisiensinya sebesar 75,76% dengan kriteria efisien, tahun 2022 sebesar 86,62% dan pada tahun 2023 sebesar 69,04% dengan kriteria efisien, serta rata-rata efisien sebesar 54,96%.

Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Rasio Efisiensi, Anggaran Program Kerja.**Abstract**

Analyzing the Budget Realization Report aims to analogize the results obtained in Regional Apparatus Units from one period to subsequent periods, so that it can be interpreted as to what the level of tendency is. Through the LRA, it is intended as a benchmark in assessing the finances of regional autonomy implementation and is also able to determine the growth and development of income and expenditure faced during a certain period. This research aims to find out and analyze the work program budget at the Sorong District Health Service in the 2021-2023 budget year. The data required in this research is the 2021-2023 Budget Realization Report. The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive research type. As well as secondary data, namely data from the 2021-2023 Budget Realization Report. The variable in this research is the work program budget which is measured using the efficiency ratio. The data analysis technique used is descriptive analysis.

After calculation activities using efficiency ratios, the results obtained show that in 2021 the efficiency is 75.76% with efficient criteria, in 2022 it is 86.62% and in 2023 it is 69.04% with efficient criteria, as well as the average efficient of 54.96%.

Keywords: *Budget Realization Report, Efficiency Ratio, Work Program Budget.*

1. PENDAHULUAN

Di Negara kita Indonesia pemaparan prinsip good governance atau pemerintah yang baik tidak semata-mata hanya memberikan pengaruh positif bagi alur pemerintahan, melainkan dapat menyalurkan pengaruh positif bagi lembaga bisnis non pemerintah. landasan yang kuat diupayakan dapat membawa Negara ini menuju pemerintahan yang bersih dan dipercaya bebas dari koruptor. Dalam penerapan prinsip *good governance* kita mengenal lebih jauh apa itu manajemen (*governance*) itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan sangat positif seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya. Selain pemerintah, terdapat manajemen (*governance*) yang adalah fungsi pengaturan dalam melaksanakan administrasi publik yang ada.

Pemerintahan yang mengangkat tinggi martabat bangsa adalah pemerintahan yang mengamankan UUD 1945. melindungi seluruh negara Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan rakyat, mewujudkan tatanan bangsa berlandaskan pancasila. target yang tepat harus menjadi dasar tambahan atas hal-hal yang harus dicapai oleh pemerintah. Badan pemerintah yang menyediakan layanan kepada sektor publik didirikan atas dasar memfasilitasi dan mengangkat kualitas layanan kepada rakyat. Pelayanan publik menjadi hak masyarakat, yang memuat prinsip-prinsip kesederhanaan, kejelasan, efisien waktu, keamanan, tanggungjawab, sarana dan prasarana, kemudahan akses, pengendalian, kesopanan, keramahan dan kenyamanan diterapkan (Mariano, 2018). *Good Governance* merupakan pemerintahan yang dapat membangun dan menerima asas profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum. Laporan keuangan pada prinsipnya merupakan hasil akhir dari proses akuntansi selama periode tertentu dan merupakan hasil pengumpulan data keuangan yang sekiranya dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para pemakai dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. eratnya hubungan antara keterkaitan keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak menimbulkan beragam kendala sehingga timbul gerakan mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

LRA menggambarkan kapasitas instansi pemerintah guna merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan. Laporan ini memberikan manfaat dalam menyelidiki sumber daya ekonomi yang nantinya digunakan untuk memberikan dana pada aktivitas pemerintah pusat dan daerah dengan cara menghadirkan pelaporan secara signifikan. Dalam perundang-undangan telah diterapkan standar agar dapat mengatur tentang seperti apa realisasi anggaran yang sebenarnya. penelitian laporan realisasi anggaran diharapkan mampu menghasilkan temuan tentang penyiaran entitas realisasi dan anggaran. penalaran dibuat hendak menginsafi sejauh mana taraf prestasi suatu objek yang sudah disetujui pemerintahan di masa mendatang. SAP adalah suatu patokan, arahan, ajaran yang diaplikasikan dalam pengerjaan laporan keuangan Pemerintahan baik pusat dan daerah. Laporan keuangan dimaksudkan agar menjadi gambaran capaian kerja suatu unit lembaga Pemerintah selama periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan seluruh aktivitas yang telah ditargetkan lebih dahulu bagi pengelolaan keuangan Pemerintah pada periode tertentu dan melakukan pertimbangan kinerja yang dicapai satuan kerja tersebut.

UU No. 71 Tahun 2003 mengenai keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 tentang perbendaharaan menegaskan pelaksanaan APBD, kepala daerah menyingkapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berbentuk laporan keuangan berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 yang berisikan 7 laporan keuangan dan salah satu yang menjadi pokok penelitian adalah laporan realisasi anggaran. Organisasi sektor publik sekarang ini sedang mengalami tuntutan dalam menganalisis pengeluaran ekonomi juga pengaruh negatif akibat tindakan yang dilakukan. Setiap badan pemerintahan pasti mengharapkan tujuannya terlaksana secara efektif dan tepat guna dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya (APBD), ditambah dengan keadaan kemajuan teknologi seperti

sekarang ini, pemerintah diharuskan melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran berdasarkan ketentuan yang diakui.

Tata kelola keuangan daerah patut dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab dan memihak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan meminimalisir pengangguran yang berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah harus menata dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan metode tepat waktu dan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan secara umum (Purba & Silalahi, 2021). Pada implementasi sistem keuangan daerah, perencanaan diawal menjadi begitu diperhatikan karena penganggaran tidak dapat dilakukan tanpa perencanaan diawal. anggaran dalam suatu instansi dinilai Penting dilihat dari tugasnya sebagai petunjuk pelaksana kegiatan. Anggaran ditaksirkan sebagai rencana awal dimana setiap persiapan atau rencana difokuskan kepada urusan yang akan dilakukan oleh organisasi di waktu mendatang dan berkontribusi dalam menggapai tujuan organisasi (Amelinda et al., 2022).

Anggaran pemerintah adalah alur penentuan sasaran dana dalam bentuk moneter di setiap agenda yang menggunakan dana dan sumbernya berasal dari publik. Setiap kegiatan membutuhkan anggaran dan langsung disisihkan pada agenda yang telah dijadwalkan.

Pengelolaan keuangan daerah adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mensistematisasi keuangan dari tahap merencanakan, melaksanakan, menganggarkan, melaporkan, akuntansi hingga mempertanggungjawabkan keuangan daerah (D. P. Sari et al., 2023).

Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah perihal penyelenggaraan pemerintahan yang dapat ditentukan dengan uang diikuti oleh segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suatu daerah. pemerintah daerah dengan laporan keuangan yang ada didalamnya mengharuskan kepala daerah mampu mengelola keuangan daerah sejalan dengan peraturan pemerintah dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No. 13, 2006).

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya sebagai salah satu instansi pemerintahan yang sudah berdiri sejak lama, dengan mendapat anggaran langsung dari kas daerah. Yang penulis ingin bahas disini adalah dalam penggunaan anggaran yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan perlakuan dalam bidang penyajian laporan keuangan di bagian unit keuangan khususnya dalam laporan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dengan menggunakan metode analisis rasio efisiensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam keputusan menteri dalam negeri (kepmendagri) nomor 690.900-327 tahun 1996, penulis ingin menilai apakah laporan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong telah terealisasi dengan efisien atau tidak. laporan realisasi anggaran yang ukur adalah laporan di tahun 2021-2023.

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan. Tujuan penelitian ini yaitu “Untuk mencari tahu keefisienan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong pada tahun 2021-2023”.

2. TEORI/METODE PENELITIAN/PERANCANGAN

Dasar Teori

Laporan keuangan merupakan laporan yang tersusun mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan menganalisa keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan utama dari pelaporan keuangan

pemerintah adalah untuk memperlihatkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Wahyudiono (2014:65), laporan keuangan merupakan aspek yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, karena ia dapat memberi informasi yang diperlukan para pemakainya dalam dunia bisnis yang mampu memberikan keuntungan, namun untuk laporan keuangan pada instansi pemerintah hanya dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aktivitas dan keadaan keuangan dari suatu instansi pemerintah tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintah, pengertian anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam suatu rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Definisi anggaran sebagai suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi (pemasaran, produksi, dan keuangan). Jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik berarti proses pelaksanaan program-program dalam bentuk pendapatan dan belanja yang dinyatakan dalam satuan moneter dan dinilai dengan uang-uang masyarakat. Menurut PP No. 34 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengertian anggaran adalah sebuah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam saham rupiah yang disusun menurut klarifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumberdaya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya yang digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mahsun, 2018). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 61 kerangka konseptual, dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode Kemudian disebutkan unsur-unsur dalam LRA yaitu;

1. Pendapatan – LRA.

Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran. pemerintah

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Efisiensi laporan keuangan adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara *output* dan *input*. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan keuangan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari laporan keuangan terkait anggaran selama ini adalah keterbatasan untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan itu, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya, merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat laba yang diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi penggunaan anggaran tersebut.

Program kerja keuangan daerah dalam hal ini adalah pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dalam penelitian ini adalah program yang bertujuan untuk melaporkan rincian capaian kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan laporan keuangan di akhir semester ataupun di akhir tahunnya. Adapun item umum dari program ini adalah :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
- c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Program kerja pada dinas kesehatan kabupaten sorong sendiri ada beberapa item yaitu:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- b. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Warsidi dan Bambang analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan (2010:Vol. 2 No. 1).

1. Rasio Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018: 65) menyatakan bahwa efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). pelaporan LRA menggambarkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan kekuatannya pada APBD. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit atau organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, Kriteria tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 2.1 Standar Pengukuran Kriteria Rasio Efisiensi

Kriteria	Keterangan
>100%	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% -90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat efisien

Sumber: Kep. Mendagri, 1996

2. Rasio Efektivitas

Berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria efektivitas akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Standar Pengukuran Kriteria Rasio Efektivitas

Kriteria	Keterangan
> 100%	Sangat efektif
>90%-100%	Efektif
>80%-90%	Cukup efektif
>60%-80%	Kurang efektif
>60%	Tidak efektif

Sebaliknya rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik.

3. Rasio pertumbuhan.

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian

Metode Pengumpulan Data

Penelitian skripsi ini, penulis melaksanakan penelitian dan proses pengambilan data dengan cara mendatangi dinas kesehatan kabupaten sorong, provinsi papua barat daya yang merupakan instansi pemerintah daerah yang terhubung langsung dengan pemerintah pusat. Instansi ini terletak di Jl. Poros Sorong Klamono KM. 24 Kabupaten Sorong.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, yang direncanakan mulai dari 20 maret 2024 - 31 mei 2024.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis supaya mampu menganalisis penyajian Laporan realisasi anggaran terhadap dana dinas kesehatan kabupaten sorong adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya mengutamakan alur siklus dan makna yang tidak di uji, atau di coba dengan akurat. Penelitian ini menggambarkan peristiwa yang di dengar, dirasakan dan disajikan dengan pernyataan naratif dan deskriptif.

Penelitian kualitatif penelitian ini merupakan data dalam bentuk angka - angka terkait laporan keuangan dan rasio untuk menilai tingkat efisiensi suatu laporan keuangan yang dinilai dari laporan realisasi anggaran (LRA) dengan objek penelitian adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong.

Sumber data yang dipakai untuk penelitian ini adalah:

Data sekunder terkait penelitian ini diterima dari berbagai macam sumber. Sumber yang di maksud adalah dari tinjauan pustaka, literatur, peneliti terdahulu, buku dan sumber lain yang sekiranya terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan pernyataan dari indiantoro dkk (2012) tentang data sekunder penulis menyimpulkan jika data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh seseorang yang melaksanakan penelitian berdasarkan sumber - sumber yang telah dipaparkan. Data sekunder terkait penelitian ini di dapat dari aktivitas observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung.

Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah menyelidiki dokumen dimana penulis mempelajari dokumen - dokumen penting yang berkaitan dengan judul penelitian. Saat melakukan penelitian ini terdapat ketetapan Pengumpulan Data yang dilakukan peneliti sebagai ketentuan dalam meneliti objek yang akan diteliti, dengan menggunakan analisa deskriptif, maka terdapat langkah-langkah:

1. Mengumpulkan data-data terkait yang dipakai untuk menyusun laporan realisasi anggaran serta dokumen yang sesuai.
2. Reduksi data Proses pemilihan, mengarah pada preferensi, abstrak, dan transmisi data "kasar" yang hadir dari rekaman tertulis di lapangan. Data - data yang telah dihimpun diambil sesuai kepentingan penelitian. Reduksi data yaitu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang, dan mengorganisasi data dengan cara direduksi hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan dikonfirmasi.
3. penyajian data, Tahap ini dilakukan setelah tahap reduksi, yang kemudian dikumpulkan dan diambil keputusan untuk menjawab masalah yang telah dipaparkan peneliti.
4. Pengambilan keputusan, bahwa setelah data disajikan maka selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Maka dapat disimpulkan, analisa deskriptif adalah menggambarkan proses penelitian secara bertahap, aktual, mengenai data yang diteliti oleh penulis. Analisa deskriptif ini digunakan untuk mengalisa pelaksanaan realisasi anggaran dengan menggunakan rasio keuangan yaitu pengukuran rasio efisiensi.

Mahmudi (2019:189) mengatakan bahwa untuk mengukur efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan standar belanjanya. nominal yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat mutlak, tetapi berubah-ubah. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Pemerintah daerah dilihat sudah menerapkan efisiensi anggaran apabila rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih dari 100% maka dianggap pemborosan anggaran.

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi yang telah dipaparkan pada tabel 4.7 di atas menggambarkan rasio efisiensi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong pada tahun 2021 tingkat efisiensinya sebesar 75,76% yang mengarah kepada kriteria efisiensi selama tahun anggaran 2021. Pada tahun 2022 tingkat efisien sebesar 84,62% yang mengarah kepada kriteria cukup efisien. Dan pada tahun 2023 tingkat efisiensinya sebesar 69,04% yang mengarah kepada kriteria efisien. Hal ini menunjukkan adanya tingkat efisiensi lebih tinggi sebesar 10,86% selama tahun anggaran 2021-2022 namun di 2022-2023 tingkat efisiensinya menurun sebesar 17,58%. Pada tingkat rasio efisiensi yang menunjukkan rata-rata tahun 2021-2023 sebesar 54,96% maka berdasarkan kriteria efisiensi yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang terkait, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong masuk dalam kriteria <60% merupakan kriteria yang sangat efisien sehingga menjadikan Laporan Realisasi Anggaran untuk menilai efisiensi anggaran program kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong sudah berjalan dengan baik dan terdapat penghematan anggaran.

4. KESIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian yang sudah diperoleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Perhitungan yang telah dilakukan berdasarkan rasio efisiensi ini, nominal yang dihasilkan bersifat relatif artinya tidak memiliki standar yang menjadi acuan supaya dianggap mumpuni untuk rasio efisiensi ini, mengingat setiap instansi memiliki standar efisiensinya masing-masing.
2. Laporan realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, jika diperhatikan dari perhitungan rasio efisiensi tahun 2021-2023 sudah terdapat penghematan. Dikarenakan, pada tahun 2021-2023 presentasi efisiensi berada diposisi <60% dengan kriteria anggaran dapat dikatakan sangat efisien.
3. Perlu diketahui bahwa sekalipun penggunaan biaya terbilang hemat dan di katakan sangat efisien, pada kenyataannya itu tidak selalu dianggap baik. terutama dalam dibidang perusahaan yang harus memenuhi target agar tercapai tujuan perusahaan. maka ada kemungkinan penggunaan anggaran perusahaan lebih besar untuk mendapatkan laba sesuai dengan capaian target yang telah ditetapkan setiap perusahaan. Sehingga dalam penerapannya diperlukan analisis rasio penunjang lainnya agar menjadi perbandingan seperti analisis efektivitas yang merujuk kepada semakin banyak penggunaan anggaran maka dikatakan berhasil atau efektif dalam penggunaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-undang nomor 71 tahun 2003 tentang keuangan Negara
- [2] Wahyudiono. 2014. *Mudah membaca laporan keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- [3] Maranjaya, Abdul Kahar. "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan." *Jurnal Sosial Teknologi* 2.11 (2022): 929-941.
- [4] Mariano (2018). Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo. Universitas Airlangga
- [5] Purba, S., & Silalahi, M. (2021). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja tahun 2014-2019 pada pemko tebing tinggi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Triangle*, 2(1), 142–150.

-
- [6] Pramono, Joko. "Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta)." *Among Makarti* 7.1 (2014).
- [7] Amelinda, at al. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 8(2), 271–284.
- [8] D. P., sary at al (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- [9] permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah
- [10] Rondonuwu, R.H., et al. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015 Hal. 23-32.*
- [11] Utami, Setyaningsih Sri. "Analisis Laporan Keuangan sebagai Dasar untuk Mengetahui Efisiensi Penggunaan Dana." *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 10.1 (2010).
- [12] Chabib Soleh. (2010). Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Bandung. Fokus Media GULTOM, BERSON. UPAYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KECAMATAN DI KANTOR CAMAT HAMPARAN PERAK. Diss. UNIVERSITAS QUALITY, 2020.
- [13] Milla, Naffa Litauji. ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR KECAMATAN KRAMAT. Diss. Politeknik Harapan Bersama Tegal, 2021.
- [14] Tumija, Tumija, and Ghina Sinta. "ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP." *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)* 9.2 (2022): 61-78.
- [15] Indiantoro dkk. 2012. Metode penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen. Yogyakarta : BPEE Edisi pertama.
- [16] Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN
- [17] Warsidi dan Bambang Agus Pramuka. 2010. Evaluasi Kegunaan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba di Masa yang Akan Datang: Suatu Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEJ. *Jurnal Analisis Akuntansi Manajemen Akuntansi dan Ekonomi* Vol. 2 No. 1.
- [18] Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi terbaru Andi. Yogyakarta.